

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No. 129 | Tahun XXXIV | Juli-Agustus 2017

Indonesia
Banking Expo
2017
Sumbangsih Perbankan
Untuk Ekonomi Bangsa

Transformasi Industri Perbankan
Jawaban terhadap Revolusi Teknologi Digital
19-20 September 2017, Cendrawasih Room & Lower Lobby, Jakarta Convention Center

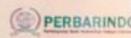
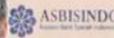
PRESS CONFERENCE

Griya Perbanas, 24 Agustus 2017

Penyelenggara



Bekerjasama



Gelar IBEX,
Perbankan Siap
Berkolaborasi dengan Fintech

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Sulit Mencapai Double Digit



Pada 2017 diproyeksikan akan terjadi perbaikan ekonomi. Namun, hingga semester pertama 2017 perbaikan ekonomi belum juga terlihat signifikan dan tidak berdampak besar dalam upaya mendorong peningkatan industri atau sektor usaha. Perlambatan ekonomi masih dirasakan oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal atau triwulan kedua 2017 sebesar 5,01% (*quarter to quarter* atau *qtq*), sama seperti pencapaian pada kuartal pertama 2017. Angka tersebut melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2016 yang sebesar 5,18% (*year on year* atau *yoy*). Artinya, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama semester pertama 2017 sebesar 5,01% (*yoy*), mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan semester pertama 2016 sebesar 5,05% (*yoy*).

Salah satu sektor usaha yang mengalami perlambatan ialah perbankan. Tercatat hingga Juni 2017 penyaluran kredit hanya tumbuh sebesar 7,7% secara tahunan (*yoy*), atau meningkat menjadi Rp4.526,44 triliun. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada Juni 2016, pertumbuhan kredit ini jauh lebih rendah. Pada Juni 2016 kredit perbankan meningkat sebesar 8,9% secara tahunan.

Memang, untuk pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) jauh lebih baik ketimbang periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hingga semester pertama 2017, perbankan berhasil menggenjot pertumbuhan DPK hingga 10,3% secara tahunan. Pencapaian ini jauh lebih baik ketimbang pencapaian pada semester pertama 2016 yang hanya sebesar 5,5%.

Tantangan lainnya yang dihadapi perbankan ialah menyangkut likuiditas. Merujuk hasil riset yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kondisi likuiditas perbankan nasional akan sedikit mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan masih adanya ketidakpastian di pasar finansial global yang masih tinggi dan adanya kebutuhan pendanaan infrastruktur dari industri perbankan.

Kabar baiknya, di tengah dampak perlambatan, para pelaku usaha di sektor perbankan mampu melakukan konsolidasi dan perbaikan. Hal itu tercermin dari penurunan rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*). Pada Juni 2017 *NPL* menjadi 2,96%. Sebelumnya, pada Juni 2016, *NPL* berada di level 3,05% dan pada Mei 2017 mencapai 3,07%.

Melihat kondisi yang terjadi hingga semester pertama tahun ini, Bank Indonesia (BI) pun akhirnya memangkas proyeksi pertumbuhan kredit pada tahun ini. BI memangkas proyeksi pertumbuhan kredit pada 2017 menjadi berada dalam rentang 8% hingga 10%. Sebelumnya BI memproyeksikan pertumbuhan kredit berada pada rentang 10% hingga 12%. Kendati demikian, BI memprediksikan kinerja perbankan dari sisi penyaluran kredit akan mengalami perbaikan pada tahun mendatang. Intermediasi perbankan pada 2018 akan lebih tinggi dengan perkiraan pertumbuhan kredit sebesar 10% hingga 12%, sedangkan DPK bisa mencapai 9%-11%. ■

Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Masih Terjanjal keterlambatan 3
 Perbaikan ekonomi masih belum signifikan. Hal ini berdampak pada kinerja industri perbankan nasional sepanjang semester pertama 2017.



Menggali Potensi di Segmen UMKM 6

Menyiasati Likuiditas dan Penyaluran Kredit 8

Kredit Dipangkas, Suku Bunga Ditekan 9
 BI memangkas proyeksi pertumbuhan kredit pada 2017. Sementara, OJK meminta bank untuk efisien agar suku bunga kredit bisa ditekan menjadi *single digit*.

Sekilas Berita

Gelar IBEX, Perbankan Siap Berkolaborasi dengan Fintech..... 11
 Industri perbankan nasional tidak menganggap pegiat *fintech* sebagai pesaing, tapi justru merangkulnya untuk maju dan berkembang bersama.



Halalbihalal Perbanas dan IBI 22

CEO Forum dan Halalbihalal Perbanas dan IBI 23

Seminar Leadership Perbanas Sumut 24

Aktualita

Kredit Infrastruktur Akan Terus Tumbuh 12

Penyaluran kredit infrastruktur terus meningkat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Peningkatan ini diharapkan terus terjadi sampai dengan akhir tahun ini.

Utang Luar Negeri Masih Aman 14

Kesiapan Transaksi Nontunai Penuh di Tol 16

Transaksi pembayaran di gerbang tol nantinya tak lagi menggunakan uang tunai. Seperti apa kesiapannya?



Liputan Khusus

Waspada Investasi Bodong 18

Sebagian masyarakat mudah tergiur investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa menghitung risikonya. Tak heran jika kasus investasi ilegal alias investasi bodong terus merebak di Indonesia.

Keuntungan Besar Menjadi Penggoda 20

OJK Akan Berangus Investasi Ilegal 21

Praktik investasi bodong masih saja banyak terjadi dan tidak sedikit memakan korban. Sebagai regulator, OJK akan memberangus investasi abal-abal tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat.



Suplemen

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

- Citibank
- PT Bank Index Selindo

Masih Terganjil Keterlambatan



Perbaikan ekonomi masih belum signifikan. Hal ini berdampak pada kinerja industri perbankan nasional sepanjang semester pertama 2017.

Pertumbuhan kredit industri perbankan pada Juni 2017 mengalami perlambatan. Penyaluran kredit tercatat Rp4.526,44 triliun atau hanya tumbuh 7,7% (*year on year/yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,6% (*yoy*). Capaian itu pun jauh lebih rendah ketimbang angka pertumbuhan pada semester pertama 2016 yang tercatat 8,9%.

Menurut data yang dilansir Statistik Perbankan Indonesia (SPI), melambatnya pertumbuhan kredit perbankan terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja tercatat Rp2.103,045 triliun atau hanya tumbuh 7,2%, padahal pertumbuhan bulan sebelumnya mencapai 8,5%. Melambatnya pertumbuhan kredit ini terutama bersumber dari kredit yang disalurkan ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan yang masing-masing tumbuh melambat dari 6,7% dan 18,5% menjadi 4,3% dan 17,1%.

Demikian pula dengan kredit investasi. Pertumbuhan kredit investasi melambat dari 7,9% pada Mei 2017 menjadi 6,4% pada Juni 2017. Melambatnya pertumbuhan kredit investasi terutama terjadi di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, serta restoran yang masing-masing tumbuh melambat dari 4,7% dan 8,2% menjadi 3,5% dan 6,7% pada Juni 2017.

Tak seperti kredit modal kerja dan kredit investasi, pertumbuhan kredit konsumsi justru mencatatkan peningkatan. Pada akhir Juni 2017 kredit konsumsi mencapai Rp1.261,29 triliun atau tumbuh 9,9%, lebih tinggi daripada pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat 9,5%. Pertumbuhan kredit konsumsi pada periode tersebut meningkat sejalan dengan momen Idulfitri 2017.

Sementara itu, sektor properti tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan pada Juni 2017. Pada periode tersebut kredit properti tumbuh 12,1% atau senilai Rp746,8

triliun, padahal pertumbuhan bulan sebelumnya mencapai 13,7%. Perlambatan pertumbuhan tersebut bersumber dari kredit yang disalurkan ke sektor konstruksi dan real estat, meski tertahan oleh peningkatan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA).

Perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada kredit konstruksi, dari 24,1% menjadi 20,8% pada Juni 2017. Demikian pula dengan pertumbuhan kredit real estat, yang melambat menjadi 10,4% dari 15,9% pada bulan sebelumnya. Kondisi sebaliknya terjadi pada KPR dan KPA yang menunjukkan akselerasi pertumbuhan dari 7,7% menjadi 7,9% pada Juni 2017.

Berbeda dengan angka penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* perbankan pada posisi Juni 2017 justru membaik. Jika per Juni 2016 *NPL* perbankan berada di level 3,05%, pada Juni 2017 turun menjadi 2,96%. Meski, pada posisi Mei 2017 *NPL* perbankan sempat berada di angka 3,07%.

Sementara itu, pada Juni 2017 rata-rata suku bunga kredit perbankan tercatat 11,77% atau turun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 11,83%. Suku bunga simpanan dengan tenor 1, 6, 12, dan 24 bulan juga turun masing-masing menjadi 6,30%, 6,95%, 7,05%, dan 6,95% dari bulan sebelumnya yang tercatat 6,37%, 7,03%, 7,11%, dan 6,97%.

Lalu, bagaimana dengan dana pihak ketiga (DPK)? Pada semester pertama 2017 industri perbankan berhasil menghimpun DPK sebesar Rp5.045,99 triliun atau meningkat 10,3%. Pertumbuhan itu jauh lebih baik ketimbang capaian pada semester pertama 2016 yang hanya 5,5%.

Hingga akhir Juni 2017, giro mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan deposito. Giro tercatat naik 11,3% atau menjadi Rp1.193,58 triliun, sementara deposito dan tabungan masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,3% dan 9,5% menjadi Rp2.297,98 triliun dan Rp1.554,44 triliun.

Kondisi Likuiditas

Beberapa waktu belakangan ini pemerintah cukup gencar menerbitkan surat utang untuk mengurangi defisit anggaran yang terus membengkak lantaran digunakan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur yang tengah menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Hal ini dikhawatirkan akan memicu pengetatan likuiditas di industri perbankan.

Tak tanggung-tanggung, uang yang berhasil dikumpulkan dari penerbitan surat utang itu mencapai puluhan bahkan ratusan triliun. Padahal, di lain sisi, saat ini perbankan didorong untuk dapat memperbesar penyaluran kreditnya ke sektor riil. Pertumbuhan sektor ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi yang masih lesu.

Nah, untuk memperbesar penyaluran kredit ke sektor riil, perbankan juga membutuhkan sumber dana, di antaranya dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat. Itu berarti, perbankan kini tengah bersaing dengan pemerintah untuk memperebutkan dana masyarakat itu.

**KINERJA KREDIT DAN DANA PIHAK KETIGA
Per Juni 2016 - 2017
(Rp Miliar)**

Keterangan	Juni 2016	Juni 2017	P(%)
Kredit			
- Modal Kerja	1.961.581	2.103.048	7,21
- Investasi	1.058.634	1.126.847	6,44
- Konsumsi	1.148.093	1.261.291	9,86
Total	4.168.308	4.491.186	7,75
Dana Pihak Ketiga			
- Giro	1.072.274	1.193.577	11,31
- Tabungan	1.418.961	1.554.440	9,55
- Deposito	2.083.436	2.297.970	10,30
Total	4.574.671	5.045.987	10,30

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birl).

Gencarnya pemerintah menerbitkan surat utang dikhawatirkan akan membuat masyarakat menarik dananya di bank sehingga mengakibatkan ketatnya likuiditas perbankan. Kendati demikian, menurut Bank Indonesia (BI), saat ini rasio kredit terhadap simpanan atau *loan to deposit ratio (LDR)* perbankan sudah turun menjadi di kisaran 88%-89%. Angka itu menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih berada di level aman, meski masalah likuiditas tahun ini masih menjadi momok bagi pelaku industri. Hal itu tecermin dari pertumbuhan kredit perbankan nasional yang masih *single digit*.

Di samping itu, ada keyakinan bahwa likuiditas yang dihimpun oleh pemerintah akan disalurkan kembali ke sektor riil dengan cepat melalui pembangunan infrastruktur. Uang yang dikeluarkan untuk gaji pegawai negara sipil (PNS) pun akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, yang berlanjut pada konsumsi rumah tangga sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Erwin Rijanto, Deputi Gubernur BI, untuk mencegah perebutan dana masyarakat antara pemerintah dan perbankan, pihaknya bersama regulator lainnya, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah, terus melakukan koordinasi. Hasil koordinasi pemerintah dengan kedua lembaga tersebut diklaim telah membuat kondisi likuiditas tak lagi ketat seperti tahun lalu.

“Iya, kami telah melakukan koordinasi. Di dalam kesepakatan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) kemarin juga Pak Gubernur (Agus Martowardojo) berkoordinasi dengan pemerintah. Ada *roadmap* yang harus dilakukan. Kalau diputuskan itu, BI bisa langsung lanjut jalan. Jadi, *don't worry* tentang itu (likuiditas). *Enggak* usah ada kekhawatiran pengetatan likuiditas,” terangnya.

Belum lama ini bank sentral juga telah mengeluarkan aturan mengenai giro wajib minimum (GWM) dari harian menjadi rata-rata (*averaging*). Bank tak akan lagi diwajibkan untuk menyimpan 6,5% dana nasabah di BI setiap hari. Bank hanya berkewajiban menyimpan 5% dana nasabah di BI setiap hari, sedangkan sisanya (1,5%) dihitung rata-rata per dua minggu. Dengan adanya kebijakan itu, pengelolaan likuiditas

perbankan diharapkan lebih fleksibel dan melonggarkan likuiditas.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang GWM Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing (Valas) bagi Bank Umum Konvensional. PBI ini merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 15 Tahun 2013.

“Sebenarnya, GWM *averaging* ini akan lebih banyak kaitannya ke likuiditas. Likuiditas *'kan* jangka pendek. Dia akan lebih efisien karena dia *averaging* itu *'kan* tetap. Nah, kalau kredit ini *'kan* jangka panjang. Permasalahan apakah melambatnya kredit itu didasarkan karena masalah likuiditas, itu sama sakali tidak,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut hasil riset yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kondisi likuiditas perbankan nasional hingga akhir tahun ini akan sedikit fluktuatif, tapi tetap terkendali. Hal itu disebabkan masih tingginya ketidakpastian di pasar finansial global. “Likuiditas bank sedikit fluktuatif, mengingat ketidakpastian di pasar finansial global yang masih tinggi, di samping perlunya mencermati kebutuhan pendanaan



Erwin Rijanto; koordinasi

infrastruktur dari industri perbankan,” ujar Direktur Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan LPS, Doddy Ariefianto.

Menurut Doddy, setelah bulan puasa dan Lebaran terlewati, kondisi operasi pasar BI kembali normal. Namun, penyaluran kredit yang meningkat perlahan turut mendorong penurunan posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Posisi operasi pasar terbuka (OPT) pada akhir Juli 2017 tercatat Rp411,17 triliun atau melonjak dari Rp187,24 triliun pada bulan sebelumnya. “Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan posisi *reverse repo* SBN dan *term deposit*, meski sebaliknya terjadi penurunan posisi SBI dan Sertifikat Deposito Bank

Indonesia (SDBI),” ungkap Doddy.

Di lain sisi, pelaku pasar juga perlu mencermati kebutuhan likuiditas valas, yang suku bunganya dalam sembilan bulan terakhir berada dalam tren meningkat secara gradual. Hal itu antara lain disebabkan oleh kenaikan suku bunga The Fed (Fed Rate). Menurut Doddy, kondisi suku bunga pasar dalam tiga bulan terakhir cenderung flat dengan kenaikan terbatas—pada 2017 suku bunga simpanan berpotensi sedikit meningkat karena tingginya kebutuhan likuiditas untuk mendorong pembangunan infrastruktur. ■

OJK Fokus Pangkas NPL di Bawah 3%

Tak hanya masalah perlambatan kredit, industri perbankan nasional juga tengah menghadapi kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*). Terkait dengan kredit bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan dapat mendorong perbankan untuk memangkas rasio kredit bermasalahnya menjadi di bawah 3% (*gross*) pada akhir 2017.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana. Menurutnya, penurunan *NPL* bank menjadi salah satu fokus utama OJK pada sisa tahun ini.

Sebagai informasi, per Mei 2017 *NPL* rata-rata industri perbankan tercatat 3,07% (*gross*) dan turun menjadi 2,96% pada Juni 2017. Namun, untuk penurunan *NPL* ini, OJK ingin menggunakan indikator masing-masing individu

bank dan bukan secara industri. “OJK akan fokus ke masing-masing bank untuk penurunan kualitas kredit ini pada akhir tahun,” ujar Heru.

Namun, melihat kondisi saat ini, lanjut Heru, upaya OJK untuk fokus menurunkan *NPL* bank di bawah 3% tampaknya tak mudah dilakukan. Menurut data OJK, pada awal 2017 ada 22 bank yang memiliki *NPL* di atas 5%. Dan, dari ke-22 bank itu, mayoritas adalah bank-bank di kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 2.

Menurut Heru, tingginya *NPL* perbankan bisa jadi karena dua aspek, yakni tata kelola internal perbankan yang buruk dan belum pulihnya kondisi ekonomi makro. “Jadi, penguatan internal bank, penguatan *governance*, penguatan *risk management*, internal, dan kesehatan jadi yang utama. Kalau bank sehat, maka intermediasi itu *'kan* otomatis,” pungkasnya.

Menggali Potensi di Segmen UMKM

Meski masih dibayangi perlambatan ekonomi, beberapa bankir tetap optimistis banknya membukukan pertumbuhan kinerja yang lebih baik. Untuk merealisasikannya, berbagai strategi pun diterapkan, salah satunya pemilihan segmen bisnis.

Kinerja industri perbankan nasional hingga semester pertama 2017 masih dibayangi perlambatan. Salah satunya terkait dengan penyaluran kredit. Hingga posisi Juni 2017, penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh sebesar 7,7% secara tahunan (*year on year* atau *yoy*). Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau posisi Mei 2017 yang tumbuh sebesar

8,6% (*yoy*), dan lebih rendah ketimbang raihan pada semester pertama 2016, yakni tumbuh sebesar 8,9%.

Kendati demikian, para pelaku usaha di sektor perbankan masih tetap optimistis bank yang dikelolanya membukukan kinerja positif. Berikut beberapa pandangan dan strategi dari beberapa bankir terkait dengan kinerja bank yang dipimpinnya.

Daniel Budirahayu,
Direktur Utama Bank Victoria International

Bertumpu pada Segmen UKM

Bank Victoria International berhasil membukukan kinerja positif selama semester pertama 2017. Pada posisi Juni 2017 Bank Victoria berhasil meraih laba bersih sebesar Rp128 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 162,47% jika dibandingkan dengan pencapaian pada posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp49 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang meningkat sebesar 81,83% atau menjadi Rp138 miliar dan



pendapatan operasional selain bunga yang meningkat 13,06% atau menjadi Rp224 miliar.

Dari sisi penyaluran kredit, sampai dengan semester pertama 2017, kredit yang disalurkan perseroan sebesar Rp14,12 triliun atau tumbuh sebesar 7,49% bila dibandingkan dengan semester pertama 2016. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 5,66% atau meningkat menjadi Rp20,76 triliun.

Selain mendorong pertumbuhan kredit, Bank Victoria berhasil menekan rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) pada level 3,66% (*gross*). Artinya, *NPL* bank ini menurun dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama yang tercatat sebesar 4,35%. Bank Victoria juga berhasil meningkatkan efisiensi melalui penurunan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO). Hingga posisi Juni 2017, BO/PO sebesar 89,65%, dari sebelumnya sebesar 94,93% pada Juni 2016.

Pertumbuhan kinerja yang positif itu pun menopang aset perseroan per Akhir Juni 2017 yang tercatat sebesar Rp25,92 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,10% bila dibandingkan dengan akhir Juni tahun sebelumnya. Dengan pencapaian itu, Daniel Budirahayu, Direktur Utama (Dirut) Bank Victoria, meyakini hingga akhir 2017 banknya akan membukukan pertumbuhan yang baik.

Daniel optimistis pertumbuhan kredit banknya berada di kisaran 11% hingga 13%. Untuk target laba bersih, hingga akhir tahun, dia memprediksi Bank Victoria dapat menumbuhkan laba bersih sebesar 30% hingga 40%.

Guna mencapai target bisnis itu, Daniel mengatakan bahwa Bank Victoria akan bertumpu pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM). “Kami tetap fokus dengan bidang UKM, ritel, dan *manufacturing*,” terangnya.

Sunarso, Wakil Direktur Utama BRI
Konsisten di UMKM

Konsisten dengan Kinerja Positif



Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada semester pertama 2017 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp13,4 triliun atau meningkat sebesar 10,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,1 triliun. Kenaikan laba bersih tersebut didorong oleh beberapa faktor, di antaranya pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang pada semester pertama 2017 tumbuh *double digit*. Selain itu, perbaikan kualitas kredit serta fokus perseroan untuk

memperkuat bisnis *transaction banking* sehingga meningkatkan *fee based income*.

Untuk DPK, hingga akhir Juni 2017 tercatat sebesar Rp768 triliun atau naik 12,3% apabila dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2016 sebesar Rp683,7 triliun. Dana murah berupa giro dan tabungan mendominasi, yaitu sebesar 56,09% dari keseluruhan total DPK BRI. Giro BRI tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 17,4%, atau meningkat menjadi Rp130,6 triliun. Tabungan tumbuh sebesar 11,5% secara tahunan menjadi Rp300,1 triliun. Di lain sisi, deposito mengalami kenaikan sebesar 11,1% menjadi Rp337,2 triliun.

Di pos lainnya, pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp36,3 triliun atau tumbuh sebesar 12,4%. Sedangkan *fee based income* terbukukan sebanyak Rp4,9 triliun atau naik 19% secara *yoy*.

Wakil Direktur Utama (Wadirut) BRI, Sunarso, mengatakan, secara konsisten perseroan selalu mampu tumbuh dan menjaga kinerja positif dalam beberapa tahun terakhir. *Market share* pinjaman BRI pada 2003 sebesar 10,8% dan pada akhir 2016 naik menjadi sebesar 14,5%. *Market share* simpanan juga tercatat mengalami kenaikan. Sebagai informasi, pada 2003 *market share* simpanan sebesar 8,6%, lalu menjadi 14,9% pada akhir 2016.

Menurut Sunarso, salah satu pendorong utama kinerja BRI selama ini ialah segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyaluran kredit hingga akhir Juni 2017 tercatat senilai Rp687,9 triliun atau tumbuh 11,8% dari penyaluran kredit pada Juni 2016 sebesar Rp615,5 triliun. Dari seluruh kredit yang disalurkan BRI, 74,4% atau senilai Rp490 triliun disalurkan ke segmen UMKM.

“Target kami, porsi pembiayaan ke segmen UMKM selalu meningkat dan pada 2022 portofolio kredit UMKM mencapai 80% dari seluruh total kredit yang disalurkan BRI,” ujar Sunarso.

Fokus dan komitmen BRI terhadap pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari fakta bahwa UMKM berkontribusi positif dalam menggerakkan perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja serta memiliki andil dalam pemerataan hasil pembangunan. Selain itu, UMKM memiliki *resilience* yang kuat menghadapi kondisi ekonomi yang sedang krisis.

Ali Rukmijah,
Direktur Utama Bank Sahabat Sampoerna

Integritas dan Kepatuhan Terbaik



Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) mengumumkan laba bersihnya selama semester pertama 2017 mencapai Rp23,9 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 20% jika dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun lalu yang mencapai sebesar Rp20 miliar. Ali Rukmijah, Direktur

Utama (Dirut) Bank Sampoerna, mengatakan, peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit yang tercatat sebesar Rp6,1 triliun pada Juni 2017 atau mengalami pertumbuhan sebesar 15% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Secara keseluruhan, Bank Sampoerna berhasil mencapai hasil kinerja positif melalui penyaluran kredit secara berhati-hati. Kami mengajak seluruh karyawan untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang bukan hanya cepat dan kuat, akan tetapi juga didukung dengan integritas dan kepatuhan terbaik,” jelasnya dalam keterangan pers.

Hingga saat ini, kredit terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap menjadi fokus utama Bank Sampoerna. Pada akhir Juni 2017 kredit pada segmen UMKM mencapai Rp4,5 triliun atau sekitar 75% dari keseluruhan kredit yang disalurkan. Jumlah ini meningkat 25% jika dibandingkan dengan kredit ke sektor UMKM pada semester pertama 2016. Untuk kredit pada segmen non-UMKM, per Juni 2017 mencapai Rp1,5 triliun.

Di pos keuangan lainnya, dana pihak ketiga (DPK) Bank Sampoerna terkumpul sebanyak Rp6,8 triliun pada semester pertama 2017 atau meningkat 20% bila dibandingkan dengan semester pertama 2016. Rinciannya, rekening giro dan tabungan atau dana murah tumbuh sebesar 34% atau meningkat menjadi Rp943 miliar, sementara deposito meningkat sebesar 18% atau meningkat menjadi Rp5,9 triliun.

Rasio kredit bermasalah (*non performing loan* atau *NPL*) Bank Sampoerna berada pada level 3,66% (*gross*) pada akhir Juni 2017. Rasio kredit bermasalah ini menurun jika dibandingkan dengan posisi per akhir Juni 2016 yang sebesar 3,97%.

Menyiasati Likuiditas dan Penyaluran Kredit

Di tengah perlambatan yang masih terjadi, berbagai upaya dilakukan pelaku industri perbankan. Mulai dari menyiasati likuiditas hingga memilih sektor potensial dalam penyaluran kredit.

Likuiditas menjadi hal penting dalam keberlangsungan bisnis bank. Agar leluasa menyalurkan kreditnya, sejumlah bank melakukan aksi korporasi melalui penerbitan surat utang atau obligasi. Penerbitan obligasi kian marak dilakukan perbankan sejak memasuki triwulan kedua tahun ini, seiring dengan pencairan kredit infrastruktur secara masif pada triwulan kedua dan ketiga tahun ini.

David Sumual, ekonom Bank Central Asia (BCA), mengatakan, menjelang akhir tahun banyak bank memerlukan likuiditas lebih guna mencukupi kebutuhan pencairan kredit di sektor infrastruktur. "Hal itu juga mendorong likuiditas yang makin ketat karena dananya akan makin ketat," jelasnya.

Menurut David, aksi korporasi diperkirakan masih akan marak dilakukan perbankan seiring dengan mulai tingginya posisi *loan to deposit ratio (LDR)* perbankan. Di lain sisi, jika dibandingkan dengan negara *emerging market* lainnya, penerbitan obligasi perbankan di Indonesia masih tergolong konservatif. "Mereka masih mengandalkan DPK (dana pihak ketiga) dibandingkan dengan mencari pendanaan di pasar modal," terangnya.

Sebagai informasi, tahun ini pemerintah memproyeksikan akan terjadi defisit penerimaan sekitar 2,6% hingga 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu bank yang sudah menerbitkan obligasi untuk memperkuat permodalannya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank ini menerbitkan obligasi senilai Rp6 triliun pada Juni lalu. Kemudian, yang terbaru adalah obligasi milik BPD Lampung senilai Rp610



Penerbitan obligasi; langkah konservatif

miliar dan BRI Agroniaga senilai Rp500 miliar yang resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, hingga saat ini, ketergantungan perbankan nasional pada DPK sebagai sumber pendanaan atau likuiditas masih sangat besar. David mengatakan, hal itu menjadi penyebab perbankan di Tanah Air cenderung konservatif dalam mencari alternatif sumber pendanaan melalui penerbitan surat utang.

Berbeda dengan negara-negara *emerging market* lainnya, nilai dan jumlah penerbitan surat utang atau obligasi perbankan di Indonesia relatif masih lebih rendah. "Oleh karena itu, sebenarnya masih ada cukup ruang untuk perbankan melakukan aksi korporasi lainnya guna menghimpun dana atau memperkuat permodalan," terangnya.

Hal senada diungkapkan Josua Pardede, ekonom PermataBank. Menurutnya, beberapa bank belakangan ini telah memitigasi

Aksi korporasi diperkirakan masih akan marak dilakukan perbankan seiring dengan mulai tingginya posisi *loan to deposit ratio (LDR)* perbankan. Di lain sisi, jika dibandingkan dengan negara *emerging market* lainnya, penerbitan obligasi perbankan di Indonesia masih tergolong konservatif.

potensi penurunan DPK. Tak heran jika banyak institusi perbankan yang mulai memperkuat permodalannya melalui penerbitan obligasi ataupun penawaran umum terbatas saham (*rights issue*).

Apalagi, pemerintah belakangan ini cenderung aktif menerbitkan surat utang. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi kekurangan pajak hingga akhir tahun ini. “Ada upaya perbankan untuk memitigasi potensi penurunan DPK jika *crowding out* terjadi. Dengan demikian, fungsi intermediasi perbankan dapat dioptimalkan, mengingat tren peningkatan rasio kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* mulai tertahan,” tutur Josua.

Josua juga mengatakan, saat ini kondisi likuiditas perbankan sejatinya cenderung terkendali. Hal itu terlihat dari rasio alat likuid terhadap DPK per Mei yang mencapai 21,7%, meningkat jika dibandingkan dengan Desember tahun lalu yang tercatat 21,6%. Peningkatan rasio alat likuid itu diikuti dengan penurunan pertumbuhan kredit pada Mei tahun ini yang tercatat 8,71% secara tahunan (*year on year* atau *yoy*), padahal pertumbuhan kredit periode Maret masih berada di angka 9,25% (*yoy*).

Berkaca pada hal-hal tersebut, lanjut Josua, penyaluran kredit perbankan akan dipengaruhi dua sisi, yakni likuiditas perbankan serta daya beli masyarakat yang akhirnya memengaruhi permintaan kredit. “Dengan demikian, kredit perbankan diperkirakan tumbuh sekitar 9%-10% (*yoy*) pada akhir tahun ini. Sehingga, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di kisaran 5,1%-5,2%,” jelasnya.

Minimnya penerbitan surat utang disebabkan beberapa hal. Di antaranya, besaran biaya dana untuk penerbitan surat utang masih menjadi tantangan karena dinilai lebih besar ketimbang DPK. Menilik besaran biaya dana yang harus dikeluarkan bank jika mencari pendanaan melalui penerbitan surat utang, biasanya kupon obligasi swasta berada di atas kupon obligasi pemerintah (Surat Utang Negara atau SUN). Jika obligasi pemerintah memiliki kupon sekitar 7% per tahun, agar lebih menarik, setiap *issuer* obligasi akan memberikan kupon di kisaran 8% hingga 9% per tahun. Artinya, bank atau *issuer* harus membayar kupon obligasi sekitar 0,66% hingga 0,75% per bulan.

Tentu, ini menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga DPK. Deposito, misalnya. Mengacu pada data Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia (BI) periode 10 Juli 2017, bunga deposito rupiah yang diberikan lembaga perbankan berkisar antara 3,9% hingga 6,6% per tahun untuk level tertinggi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa biaya dana yang

berasal dari instrumen dana mahal sekalipun masih lebih rendah ketimbang kupon yang harus dibayarkan bank kepada *obligor* jika menerbitkan surat utang.

Properti Berpotensi

Sektor properti menjadi salah satu sektor yang pertumbuhannya mengalami perlambatan pada Juni 2017. Kredit properti tercatat Rp746,8 triliun atau tumbuh 12,1% secara tahunan (*yoy*), lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 13,7% (*yoy*). Perlambatan pertumbuhan tersebut bersumber dari kredit yang disalurkan ke sektor konstruksi dan real estat, meski tertahan oleh peningkatan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR).

Pada Juni 2017 kredit konstruksi tercatat melambat dari 24,1% (*yoy*) menjadi 20,8% (*yoy*). Demikian pula dengan pertumbuhan kredit real estat yang melambat menjadi 10,4% (*yoy*) dari 15,9% (*yoy*) pada bulan sebelumnya. Kondisi sebaliknya terjadi pada KPR dan KPA yang pertumbuhannya justru meningkat dari 7,7% (*yoy*) menjadi 7,9% (*yoy*) per Juni 2017.

Menurut Paul Sutaryono, pengamat perbankan, kredit properti, khususnya KPR, memiliki potensi yang sangat baik ke depan. Paul mengungkapkan, saat ini

pemerintah telah meluncurkan aneka stimulus untuk menggairahkan sektor properti. Di antaranya, melalui Program Sejuta Rumah dan mengganti skema pembiayaan perumahan model Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi program subsidi selisih bunga serta penurunan suku bunga tetap (*fixed rates*) rumah subsidi dari 7,25% menjadi 5%.

Selain itu, pelonggaran rasio *loan to value (LTV)* dari 80% menjadi 85%. Itu berarti, uang muka (*down payment*) turun dari 20% menjadi 15% dari nilai jual rumah. Penurunan uang muka itu bertujuan menjembatani daya beli (*purchasing power*) masyarakat level menengah ke bawah yang belum pulih benar. Saat ini kekuatan finansial masyarakat masih lemah sehingga kurang mampu membeli rumah dengan uang muka tinggi.

Menurut Paul, ke depan pemerintah akan banyak mendorong sektor properti demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sektor properti mampu menyerap tenaga kerja hingga 8 juta orang atau setara dengan 6,62% dari seluruh total tenaga kerja.

Nah, dengan berbagai stimulus dari pemerintah, Paul memproyeksikan, ke depan sektor properti akan menggeliat. Setidaknya, akan menjadi salah satu sektor potensial bagi penyaluran kredit perbankan. ■



David Samual; andalkan DPK

Minimnya penerbitan surat utang disebabkan beberapa hal. Di antaranya, besaran biaya dana untuk penerbitan surat utang masih menjadi tantangan karena dinilai lebih besar ketimbang DPK.

Kredit Dipangkas, Suku Bunga Ditekan

BI memangkas proyeksi pertumbuhan kredit pada 2017. Sementara, OJK meminta bank untuk efisien agar suku bunga kredit bisa ditekan menjadi *single digit*.

Melihat kondisi ekonomi saat ini dan pencapaian kinerja perbankan hingga semester pertama 2017, Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi pertumbuhan kredit selama 2017. Kemungkinan terbesar pertumbuhan kredit pada 2017 hanya akan mencapai *single digit*, tidak mencapai *double digit*. BI memangkas proyeksi pertumbuhan kredit menjadi berada dalam rentang 8% hingga 10%, dari sebelumnya pada rentang 10% hingga 12%.

Pemangkas proyeksi pertumbuhan kredit oleh BI itu sejalan dengan masih rendahnya penyaluran kredit perbankan hingga Juni 2017 yang tercatat hanya tumbuh sebesar 7,6% secara tahunan (*year on year* atau *yoy*). “Alasan utama kami menurunkan (proyeksi pertumbuhan kredit) ialah karena perkembangan sampai dengan Juni 2017 menunjukkan pertumbuhan kredit secara *year-to-date* (Januari-Juni 2017) ada di bawah 3%,” ujar Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo.

Kendati demikian, menurut Agus, kinerja perbankan dari sisi penyaluran kredit akan mengalami perbaikan pada tahun depan. Dia meyakini, intermediasi perbankan pada 2018 akan lebih tinggi dengan perkiraan pertumbuhan kredit sebesar 10% hingga 12% dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bisa mencapai 9%-11%.

“Kami itu melihat *business plan* perbankan. Kami juga analisis kondisi ekonomi Indonesia, dan kondisi perbankan yang dalam konsolidasi. Karena, mereka melihat ada tren peningkatan *NPL*,” terang Agus.

Sementara itu, untuk mendukung pembiayaan perekonomian sekaligus memperdalam pasar keuangan, BI bersama otoritas terkait akan mempercepat proses konsolidasi perbankan serta mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan korporasi melalui pasar keuangan. Kebijakan ini dilakukan bersamaan dengan penurunan suku bunga yang ditujukan untuk mendorong intermediasi perbankan yang lebih optimal guna mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

BI meminta pelaku industri perbankan segera merespons penurunan BI 7-Day Reverse Repo Rate melalui suku bunga



Wimboh Santoso; efisiensi

kredit. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit pada tahun ini dan tahun depan. Sebagai informasi, sampai dengan saat ini pertumbuhan kredit masih melambat.

Di lain pihak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis di tengah perlambatan pertumbuhan kredit perbankan, suku bunga kredit masih berpeluang untuk turun menjadi *single digit*. Saat ini suku bunga kredit berada pada kisaran 11,77% per Juni 2017 secara rata-rata industri. Berdasarkan pemantauan OJK, beberapa bank sudah memberikan bunga kredit di bawah 10% pada tahun ini. Suku bunga kredit yang di bawah 10% tersebut baru diberikan kepada korporasi saja, belum keseluruhan segmen.

Berdasarkan data BI, suku bunga kredit menurun lebih lambat dibandingkan dengan suku bunga simpanan berjangka. Pada Juni 2017 rata-rata suku bunga kredit tercatat 11,77%, turun bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya 11,83%. Sementara, suku bunga simpanan dengan tenor 1, 6, 12, dan 24 bulan turun masing-masing menjadi 6,30%, 6,95%, 7,05%, dan 6,95%, dibandingkan dengan bulan sebelumnya 6,37%, 7,03%, 7,11%, dan 6,97%.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan, untuk mencapai suku bunga kredit menjadi *single digit* ada beberapa hal yang harus dilakukan perbankan. Beberapa hal itu antara lain perbankan harus menekankan efisiensi dari segi biaya dan memfokuskan pada perkembangan teknologi yang ada, dalam hal ini digitalisasi perbankan.

Dengan melakukan efisiensi dan mengedepankan digitalisasi perbankan, Wimboh meyakini hal itu akan mendorong perbankan untuk dapat menurunkan suku bunga kreditnya. Itu juga sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang sudah dilakukan bank sentral dengan memangkas suku bunga acuan.

“Tingkatkan efisiensi perbankan dan penerapan teknologi dan strategi yang lebih baik kepada segmen yang membutuhkan pembiayaan dan prospek lebih baik. Serta, *monitoring* kredit dengan teknologi dan *service* teknologi bisa mendapatkan penghematan lebih banyak yang nantinya membuat suku bunga kredit turun,” ujar Wimboh. ■

Gelar IBEX, Perbankan Siap Berkolaborasi dengan Fintech

Industri perbankan nasional tidak menganggap pegiat *fintech* sebagai pesaing, tapi justru merangkulnya untuk maju dan berkembang bersama.

Perbanas kembali menggelar Indonesia Banking Expo (IBEX). *Event* tahunan ini diharapkan mampu menjadikan perbankan Indonesia sebagai industri yang makin melek teknologi dan makin kreatif dalam menjalankan bisnis.

Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, mengatakan, tantangan dalam pengembangan teknologi informasi (TI) tidak hanya dihadapi industri perbankan. Saat ini hampir semua industri harus mengikuti tren perubahan tersebut untuk terus mengarah ke era digitalisasi. Perbanas ingin menjawab tantangan tersebut dengan menggelar IBEX 2017 yang mengusung tema “Transformasi Industri Perbankan, Jawaban terhadap Revolusi Teknologi Digital”.

“Kami ingin mengusung tema yang *disruptive* untuk menjawab tantangan mengenai pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan perbankan itu sendiri,” jelasnya saat konferensi pers terkait dengan IBEX di Griya Perbanas, Kamis, 24 Agustus 2017.

Menurut Kartika, sangat pesatnya kemajuan teknologi saat ini didorong oleh tren digitalisasi yang merambah semua aspek perekonomian nasional. Selain itu, tren digital sudah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kartika juga mengungkapkan, disrupsi perbankan masih akan terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Sama seperti industri transportasi, perbankan harus bisa mengandeng para pemain yang bergerak di industri digital tersebut.

Sementara itu, Sis Apik Wijayanto, Ketua Steering Committee IBEX 2017, mengatakan, pameran kali ini tidak hanya menampilkan industri perbankan. Perusahaan *financial technology (fintech)* serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan digandeng untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, pameran tersebut harus bisa menjadi jembatan pertukaran ide antarindustri agar inovasi di industri perbankan tidak tertinggal oleh industri lainnya.

Ke depan, melalui IBEX 2017, pelaku perbankan nasional bersama-sama dengan pelaku usaha di berbagai bidang, seperti telekomunikasi, transportasi, dan ritel, akan mengusung inovasi pengembangan teknologi dan digital yang sesuai dengan perubahan perilaku konsumen ke arah digitalisasi. “*Fintech* sudah banyak yang masuk ke ranah perbankan. Seberapa cepat berkembangnya, kami masih belum tahu. Regulator juga sudah menyiapkan aturan-aturannya. Jadi, ke depannya, kami akan berkolaborasi, bukan berkompetisi,” tuturnya.



Sis Apik menambahkan, IBEX 2017 akan lebih banyak menasar anak muda. Kegiatan yang bakal diselenggarakan pada 19-20 September 2017 ini ditargetkan akan dihadiri 3.000 pengunjung. Dalam ajang ini akan digelar seminar, pameran, *talkshow* dan Bankers Performance Competition (BPC).

Seperti penyelenggaraan sebelumnya, IBEX tahun ini melibatkan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain regulator, asosiasi industri dan profesional perbankan mendukung acara ini. Mereka adalah Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dan Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Dengan hadirnya para pemangku kepentingan di industri perbankan, diharapkan terjadi pertukaran pemikiran yang menghasilkan nilai strategis bagi kemajuan perbankan Indonesia dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

“Nantinya masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia memberikan jawaban atas transformasi digital yang dilakukan selama ini,” tutup Sis Apik. ■

Kredit Infrastruktur Akan Terus Tambah

Penyaluran kredit infrastruktur terus meningkat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Peningkatan ini diharapkan terus terjadi sampai dengan akhir tahun ini.

Upaya pemerintah untuk terus membangun infrastruktur adalah bentuk dari memajukan perekonomian nasional. Pembangunan yang merata akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan, kunci sukses pengelolaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang stabil. Penguatan infrastruktur diyakini mampu mendukung hal-hal tersebut.

“Komponen tersebut patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid di pusat dan daerah,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengatakan, prioritas pemerintah yang membangun infrastruktur merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur dinilai sebagai kunci untuk mewujudkan negara yang masyarakatnya kompetitif.

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia membuat infrastruktur menjadi sangat diperlukan saat ini. Terutama untuk memajukan pembangunan ekonomi dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.



Pembangunan infrastruktur; memajukan perekonomian nasional

“Tidak ada negara kompetitif yang infrastrukturnya tertinggal. Makanya, Presiden Jokowi sangat fokus pada infrastruktur,” sambungnya.

Dia melanjutkan, tekad pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sudah tidak bisa ditunda lagi. Negeri ini perlu mengejar ketertinggalan dan melindungi masyarakat dari dampak pelemahan ekonomi yang masih terjadi sampai dengan saat ini.

Rencana pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur juga diikuti oleh industri perbankan. Dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, pihak perbankan juga memberikan prioritas untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan infrastruktur.

Menurut data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit perbankan mulai meningkat seiring dengan

permintaan kredit dari berbagai sektor. Setelah beberapa waktu mengalami perlambatan pertumbuhan, pada akhir Mei lalu, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 10,4%.

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan penyaluran kredit paling tinggi dilakukan oleh bank-bank pelat merah yang mencapai kisaran 14%. Pertumbuhan kredit yang cukup tinggi terjadi pada sektor infrastruktur, konstruksi, pertanian, dan perdagangan.

OJK melihat, pertumbuhan kredit tahun ini masih akan berada di kisaran 9%-12%. Hal ini juga didukung oleh

permodalan perbankan yang masih cukup tinggi sehingga target yang dicanangkan tadi diyakini akan tercapai.

Banyak Diminati

Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah belakangan ini ternyata juga memancing minat perbankan untuk memberikan kontribusi ke dalamnya. Salah satu bank yang sudah menunjukkan minatnya ialah Bank HSBC Indonesia.

Sumit Dutta, Presiden Direktur HSBC Indonesia, mengatakan, pihaknya akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penerbitan obligasi lintas negara hingga manajemen risiko.

“Dukungan HSBC seperti penerbitan obligasi sampai manajemen risiko akan mendukung proyek infrastruktur lokal maupun lintas negara, mulai dari investor besar dan kontraktor. HSBC juga senantiasa menciptakan solusi perdagangan dan pembiayaan yang inovatif bagi klien yang terlibat dalam proyek infrastruktur,” ujarnya kepada *infobanknews.com*.

Dia melanjutkan, berbagai macam layanan akan disiapkan untuk mendukung penyaluran pembiayaan infrastruktur ini. Tidak hanya itu, banknya juga akan mendorong pelaku bisnis untuk melihat peluang yang lebih besar.

Menurutnya, pengalaman dan portofolio yang dimiliki HSBC di kawasan regional sangat membantu untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nasabah HSBC juga sudah banyak yang menunjukkan ketertarikannya untuk masuk ke sektor tersebut.

Dukungan pemerintah terhadap kemudahan berbisnis (*ease of doing business/EODB*) di Tanah Air menjadi kunci utama untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri. Menurut Sumit, fokus pemerintah untuk meningkatkan kemudahan bisnis tersebut sudah mendapat apresiasi dari Bank Dunia. Yakni, peningkatan peringkat *EODB* Indonesia menurut Bank Dunia dari semula 106 menjadi 91.

“Pemerintah Indonesia semakin mendukung bisnis dan investasi dengan memangkas birokrasi dan *red tape*. Saya percaya pemerintah dapat membawa *EODB* Indonesia ke peringkat ke-40,” tambahnya.

Salah satu bank yang membukukan peningkatan kredit dari sektor infrastruktur ialah Bank Mandiri. Sampai dengan

ANGGARAN INFRASTRUKTUR (dalam Rp triliun) *)APBN-P

Tahun	% terhadap Belanja Negara	Nominal
2012*	9,8	140,8
2013*	10,2	155,9
2014*	8,7	154,7
2015*	14,2	256,1
2016*	15,2	269,1
2017	19,6	387,3

Sumber: Kemenkeu, APBN 2017

pembiayaan jalan raya dan jalan tol sebesar Rp8,4 triliun, tenaga listrik Rp27 triliun, migas dan energi terbarukan Rp20,9 triliun, sektor konstruksi sebesar Rp13,1 triliun, dan telematika sebesar Rp8,5 triliun.

Tidak hanya bank besar yang ingin mencicipi kue sektor pembiayaan infrastruktur. Bank-bank kecil juga. Bank-bank kecil ingin memberikan kontribusi kepada sektor yang sedang naik daun tersebut.

Irfanto Oeij, Direktur Utama Bank Mayora, mengatakan, pihaknya baru akan masuk ke sektor infrastruktur pada semester kedua 2017. Dia menegaskan bahwa sektor yang akan dimasukinya ialah sektor penunjang infrastruktur.

Bank Mayora hanya akan menasar pembiayaan kredit komersial atau menengah. “Dana kami tidak cukup untuk membiayai infrastruktur yang membutuhkan dana besar sehingga kami akan masuk di sektor penunjangnya,” katanya kepada wartawan.

Menurutnya, sektor yang akan dimasukinya ialah sektor besi baja. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menjajaki kredit sindikasi infrastruktur. Setidaknya, penyaluran kredit pada sektor ini akan mencapai Rp600 miliar atau tumbuh 16% sampai dengan akhir tahun nanti.

Hal serupa juga akan dilakukan Bank Dinar Indonesia. Bank Dinar mengincar penyaluran kredit ke infrastruktur penunjang yang terkait dengan perdagangan, seperti *supplier* besi baja, pasir, dan pengangkutan bahan bangunan hingga toko bangunan.

Hendra Lie, Direktur Utama Bank Dinar, mengatakan, porsi kredit banknya ke penunjang infrastruktur bertambah. Saat ini pendukung infrastruktur menyumbang 25,49% terhadap total kredit Bank Dinar yang sebesar Rp1,33 triliun pada semester pertama 2017 dari 15% pada akhir 2016. ■

semester pertama 2017, kredit infrastruktur yang disalurkan Bank Mandiri sebesar Rp133,7 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 15% dari periode yang sama tahun lalu.

Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Bank Mandiri, mengatakan, penyaluran kredit tersebut banyak ditujukan ke sektor transportasi sebesar Rp36 triliun. Penyaluran lainnya yaitu ke



Sri Mulyani Indrawati; sangat diperlukan

Utang Luar Negeri Masih Aman

Utang luar negeri Indonesia terus meningkat. Namun, peningkatan ini dinilai masih dalam batas aman.

Pada semester pertama 2017 utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US\$335,3 miliar atau setara dengan Rp4.483,9 triliun. Menurut data Bank Indonesia (BI), nilai utang tersebut merupakan gabungan antara utang publik dan swasta. Data BI juga menyebutkan, utang tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu lebih rendah daripada tahun lalu yang pertumbuhannya mencapai 6,8%.

Dari nilai utang tersebut, kontribusi utang publik atau utang pemerintah cenderung meningkat. Sampai dengan triwulan kedua 2017, utang publik meningkat 7,3% atau menjadi US\$170,3 miliar. Sedangkan, utang pihak swasta justru menurun 1,4% atau menjadi US\$165 miliar. Sehingga, porsi utang publik dan utang swasta masing-masing menjadi 50,8% dan 49,2%.

Bila dilihat dari sektor ekonomi, ULN swasta masih terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas, dan air bersih (LGA). Pangsa ULN keempat sektor tersebut mencapai 76,6% dari total ULN swasta.

Agus Martowardojo, Gubernur BI, mengakui, memang ada peningkatan ULN pemerintah. Pihaknya juga tengah memantau kenaikan tersebut. Meski demikian, kondisi tersebut masih relatif aman. “Secara rasio, menunjukkan total utang luar negeri terhadap PDB (produk domestik bruto) dalam kondisi aman,” jelasnya kepada wartawan.



Sektor listrik; dibiayai ULN swasta

Agus menambahkan, dalam undang-undang (UU) keuangan negara disebutkan bahwa utang terhadap PDB tidak melebihi 60%. Sedangkan, menurut data BI, rasio utang terhadap PDB tercatat stabil di kisaran 34,2% pada semester pertama 2017. Nilai tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dengan semester pertama 2016 yang rasionya mencapai 37,2%. Rasio tersebut juga masih lebih baik dibandingkan dengan negara setara lainnya, seperti Malaysia dan Turki. Bila ada penarikan ULN, lanjut Agus, harus dipastikan jangka waktunya. Selain itu, manajemen ULN diharapkan terjaga dengan baik.

Sementara itu, Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, dalam siaran persnya mengatakan bahwa ULN masih didominasi tenor panjang yang jumlahnya mencapai US\$290 miliar. Nilai tersebut setara dengan 86,5%

dari total ULN. Sisanya merupakan ULN bertenor pendek dengan nilai US\$45,3 miliar atau setara dengan 13,5%.

Menurut Agusman, BI akan terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu. Hal itu dilakukan guna memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makro-ekonomi.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebelumnya sempat mengatakan bahwa rasio

utang Indonesia masih sangat aman. Menurutnya, beberapa negara lain memiliki rasio utang di atas 100% dari nilai PDB. “Utang Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ini tidak termasuk yang tinggi,” ujarnya.

Memang, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ULN terus mengalami peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, peningkatan ULN setidaknya sudah lebih dari Rp1.000 triliun.

Menurut Darmin, maraknya pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah menjadi penyebab pesatnya pertumbuhan utang tersebut. Pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi.

Meski demikian, pemerintah juga sudah mengupayakan berbagai skema untuk mengurangi utang dalam pembangunan infrastruktur. Hal itu perlu dilakukan agar tidak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Darmin, pemerintah juga fokus mencari sumber pendanaan lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut. Saat ini pemerintah terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk menarik investor dari dalam maupun luar negeri untuk menempatkan dananya di Tanah Air.

Utang Jatuh Tempo Terus Meningkat

Utang luar negeri yang terus meningkat menyebabkan pembayaran jatuh tempo ikut naik pula. Menurut informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang jatuh tempo dalam dua tahun ke depan masih akan tinggi.

Berdasarkan data DJPPR, pada 2018 utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp390 triliun, dan masih ada sekitar Rp420 triliun pada tahun berikutnya. Total utang

jatuh tempo yang mencapai Rp810 triliun tadi merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, mengatakan, utang pemerintah sudah direncanakan dengan baik dan semuanya ada dalam APBN. APBN yang bersifat ekspansif ini memerlukan banyak dana yang juga harus dibiayai dari pinjaman. “APBN kita bersifat ekspansif sehingga kita bisa membangun infrastruktur, membiayai pengeluaran unit perlindungan sosial, transfer ke daerah, dan lain-lain untuk pembangunan Indonesia,” ungkapnya kepada wartawan.

Suahasil mengakui, pengeluaran yang dilakukan selama ini lebih besar daripada penerimaan. Karena itu, kebijakan berutang menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk menjalankan anggaran defisit tersebut.

Suahasil juga mengatakan, defisit dalam satu tahun APBN dijaga agar tidak lebih dari 3% dari PDB Indonesia pada tahun tersebut. “Hal itu ada di UU keuangan negara, dan pemerintah akan memastikan serta menjaga maksimal utang 3% tersebut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara tiap tahunnya,” tegasnya.

Sementara itu, Tony Prasetyantono, pengamat ekonomi, sempat mengatakan bahwa pertumbuhan utang yang terjadi saat ini sudah baik. Pasalnya, pertumbuhan utang terbilang lambat. Menurutnya, pemerintah sudah sangat hati-hati dalam menambah utangnya.

“Berarti, kita semakin konservatif untuk melakukan tambahan utang. Apalagi kalau dari sisi pemerintah, jelas pemerintah tidak boleh sembarangan menaikkan defisit.

Meskipun sempat tertekan, tahun lalu defisit hanya 2,46% terhadap *GDP* (*gross domestic product*),” tambahnya.

Menurutnya, Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara seperti Brasil, yang defisit APBN-nya mencapai 10% dari *GDP*, dengan cara menambah ULN. Maka, baginya, tren yang dilakukan pemerintah sudah benar.

“Meskipun, risikonya, pemerintah tidak mampu mendorong atau menstimulus fiskal sebagaimana kebutuhan. Kita ‘*kan* butuh dorong fiskal. Namun, kalau *bikin* APBN tambah utang, itu tidak *sustainable*,” tutup Tony. ■

Utang Luar Negeri (dalam US\$ miliar)

	2014	2015	2016	H1-2017
Utang Publik	129,7	142,6	158,3	170,3
Utang Swasta	163,6	167,6	158,8	165

Sumber: Bank Indonesia (BI).



Darmin Nasution; masih aman

Kesiapan Transaksi Nontunai Penuh di Tol

Transaksi pembayaran di gerbang tol nantinya tak lagi menggunakan uang tunai. Seperti apa kesiapannya?

Sejak tahun lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan bahwa transaksi pembayaran di gerbang tol tidak lagi menggunakan uang tunai. Jokowi menyatakan bahwa transaksi di gerbang tol harus bebas antrean dan menerapkan sistem pembayaran nontunai. Semua transaksi harus dilakukan dengan aplikasi-aplikasi sensorik. Aplikasi tersebut nantinya akan dihubungkan dengan akun di bank.

Saat ini di setiap gerbang tol terdapat dua loket pembayaran, yakni gerbang tol otomatis (GTO) dan manual. Gerbang tol manual pun saat ini menerima pembayaran tunai dan nontunai. Oleh sebab itu, gerbang tol manual tersebut dinamakan gerbang tol hibrid. Namun, mulai Oktober 2017, gerbang tol hibrid hanya dapat melayani transaksi nontunai. Tepat pada 1 Oktober 2017 seluruh gerbang tol akan menerapkan pembayaran nontunai dengan menggunakan uang elektronik (*electronic money*-*e-money*) dan tidak lagi melayani pembayaran secara tunai.

Terkait dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan pelaku perbankan terus melakukan sosialisasi. Menurut Sugeng, Deputi Gubernur BI, kebijakan tersebut diterapkan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang disampaikan pada April 2016. "Presiden telah memberikan arahan yang tegas dan jelas pada April 2016 terkait dengan transaksi pembayaran di jalan tol agar antrean di gerbang tol dihilangkan," ujar Sugeng.

Uji coba sistem pembayaran nontunai di gerbang tol telah dilakukan saat Lebaran lalu. Hasilnya, pangsa transaksi nontunai di jalan tol meningkat signifikan, dari 16,4% pada



Alat pembayaran tol nontunai; pangsa transaksi meningkat

Januari 2016 menjadi 28% pada Juni 2017. Sedangkan, penetrasi transaksi nontunai di jalan tol area Jabodetabek menjadi 33,16% pada Juni 2017.

Hingga saat ini, sudah ada lima bank yang ikut serta dalam program pembayaran nontunai di gerbang tol. Kelima bank tersebut adalah Bank Mandiri dengan uang elektronik E-Money Mandiri, Bank Central Asia (BCA) dengan Flazz BCA, Bank Negara Indonesia (BNI) dengan BNI TapCash, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Brizzi, dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Blink BTN.

Rencananya, akhir tahun ini akan ada tiga bank lagi yang ikut serta dalam sinergi pembayaran tol secara nontunai, yakni Bank Mega, Bank DKI, dan Bank Nobu. Direktur Eksekutif Program Transformasi BI, Aribowo, mengatakan, ketiga bank yang akan ikut serta dalam program tersebut nantinya akan menggunakan produk uang elektronik yang dimilikinya, yakni

Mega Cash dari Bank Mega, JakCard dari Bank DKI, dan Nobu E-Money dari Bank Nobu.

Menurut Aribowo, ketiga bank tersebut sudah mengajukan izin kepada BI untuk ikut serta dalam sinergi pembayaran tol secara nontunai dengan menggunakan *e-money*. Sekadar informasi, ketiga bank tersebut sudah cukup lama menerbitkan *e-money*, tapi pangsa pasarnya (*market share*) masih sedikit.

Sejatinya, setiap bank bisa ikut berpartisipasi dalam program tersebut. “Ini sistemnya akan kami terapkan bisa membaca semua penerbit *e-money*. Nah, bagi bank yang belum masuk, nanti masuknya bisa lewat *co-branding* kerja sama dengan bank-bank penerbit *e-money*,” terang Aribowo.

Di lain sisi, BI sudah menerbitkan aturan bagi lembaga keuangan yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut, dengan mengikuti standar yang ditetapkan BI. Misalnya, untuk kartu elektronik yang akan dijadikan media pembayaran, spesifikasinya diatur BI agar seragam dan lebih mudah dibaca alat pembaca kartu.

Lantas, bagaimana kesiapan bank-bank? Sebagai salah satu bank yang ikut serta dalam layanan pembayaran nontunai di gerbang tol, pihak Bank Mandiri menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan program tersebut. Direktur Teknologi dan Digital Banking Bank Mandiri, Rico Usthavia Frans, mengatakan, untuk mengimplementasikan layanan nontunai di gerbang tol, Bank Mandiri terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti BI dan BPJT.

Hingga saat ini, memang masih ada beberapa perusahaan penyelenggara tol yang belum siap dari segi infrastruktur. Namun, Bank Mandiri bersama bank-bank lain yang ikut serta dalam penyelenggaraan layanan nontunai di gerbang tol, terus mendorong perusahaan penyelenggara tol untuk sama-sama berbenah. Selain itu, terus berupaya mengedukasi masyarakat terkait dengan pembayaran nontunai di gerbang tol.

“Yang susah itu nanti bagaimana kami *men-deliver* kartunya dan mengedukasi masyarakat. Berarti sudah siap, dari infrastruktur juga sudah siap, jadi nanti tinggal pembagian kartunya. Yang penting edukasi ke masyarakatnya,” papar Rico.

Untuk infrastruktur di gerbang tol, pihak operator tol sendiri mengaku terus berupaya menyiapkannya. Menurut Dwimawan Heru, *AVP Corporate Communication* PT Jasa Marga (Persero), seluruh gardu tol yang dikelola



Rico U. Frans; berkoordinasi

Gardu tol yang sudah siap menggunakan seluruh *e-money* bank yang sudah berpartisipasi baru sekitar 47% dari total gerbang tol yang ada.

Jasa Marga saat ini sudah dapat menerima pembayaran tol 100% dengan menggunakan uang elektronik, tapi tidak semua *e-money* bank bisa digunakan.

Gardu tol yang sudah siap menggunakan seluruh *e-money* bank yang sudah berpartisipasi baru sekitar 47% dari total gerbang tol yang ada. “Seluruh gardu tol yang sudah siap untuk pembayaran uang elektronik sudah 47%. Ini akan ditingkatkan lagi jumlahnya. Peningkatan akan kami lakukan secara bertahap,” ungkap Heru.

Sejauh ini Jasa Marga juga telah memberlakukan transaksi 100% elektronik (*full GTO*) di beberapa gerbang tol di daerah Jabotabek, yakni Gerbang Tol Cililitan 3,

Gerbang Tol Halim 3, Gerbang Tol Semanggi 1, Gerbang Tol Senayan, Gerbang Tol Cengkareng 3, dan Gerbang Tol Kunciran 1 (arah Merak). Selain itu, Gerbang Tol Kunciran 2 (arah Jakarta), Gerbang Tol Karawaci 2 (arah Jakarta), dan Gerbang Tol Bekasi Barat 3.

Siapkan Diskon

Dalam rangka memuluskan penyelenggaraan pembayaran tol nontunai, BI bersama dengan BPJT dan perbankan terus melakukan sosialisasi serta menggelar program promosi. Bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2017, perbankan dan BPJT akan memberikan berbagai program diskon untuk meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik dalam pembayaran tol. Hal ini diharapkan bisa dengan cepat mengubah perilaku masyarakat yang telah terbiasa dengan pembayaran tunai. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni V.

Panggabean, mengatakan, perbankan nasional dan BPJT telah sepakat untuk memberikan diskon bagi setiap pembelian kartu *e-money* baru yang diterbitkan Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI.

“Sudah ada kesepakatan akan memberikan diskon sampai dengan 50%. Jadi, jangan sampai telat beli kartunya. Ini mulai berlaku 17 Agustus hingga 30 September 2017. Jadi, harus cepat,” ujar Eni.

Tak hanya diskon separuh harga bagi pengguna baru uang elektronik, BPJT juga siap memberikan diskon tambahan sebesar 10% selama periode tersebut di seluruh ruas tol yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Insentif yang diberikan ini diharapkan mampu mengubah pola transaksi pembayaran masyarakat. ■

Waspada Investasi Bodong

Sebagian masyarakat mudah tergiur investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa menghitung risikonya. Tak heran jika kasus investasi ilegal alias investasi bodong terus merebak di Indonesia.

Kasus investasi bodong kerap kali terjadi dan memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Namun, sebagian masyarakat masih saja terjebak dan menjadi korban penipuan investasi tersebut. Edukasi bisa menjadi solusi agar masyarakat paham akan bahaya investasi bodong dan terhindar dari penipuan tersebut.

Belakangan ini banyak sekali kabar yang beredar mengenai terungkapnya investasi bodong di berbagai pelosok di Tanah Air. Korbannya beragam, mulai dari masyarakat kelas atas hingga kelas bawah. Jumlah kerugian yang harus ditanggung para korban pun tak sedikit, mencapai triliunan rupiah.

Banyaknya jumlah korban investasi bodong menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal, kalau mereka mau melihat lebih jauh ke depan, jalan pintas tersebut tidak akan selamanya mulus.

Para korban investasi bodong biasanya diiming-imingi imbal hasil dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Padahal, itu justru sangat berlawanan dengan regulasi yang ditetapkan regulator, bahwa produk investasi tidak boleh memberikan janji atau iming-iming dengan jumlah yang pasti.

Sebagian besar korban investasi tersebut terjebak dalam investasi yang menggunakan skema Ponzi. Skema yang sudah dikenal sejak 1920 ini pada dasarnya mengandalkan aliran dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama.



Koperasi Pandawa Mandiri Group; merugikan masyarakat

Sehingga, mereka berani menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, ketika dana segar yang masuk melamban, rantai ini pun perlahan runtuh.

Sebagian besar korban investasi tersebut terjebak dalam investasi yang menggunakan skema Ponzi. Skema yang sudah dikenal sejak 1920 ini pada dasarnya mengandalkan aliran dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama. Sehingga, mereka berani menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, ketika dana segar yang masuk melamban, rantai ini pun perlahan runtuh.

Saat ini banyak perusahaan atau lembaga di luar industri jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan mengelolanya layaknya sebuah perusahaan investasi. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin resmi dari regulator terkait.

Tanpa izin dari regulator terkait, mereka menghimpun



Layanan perbankan; menawarkan produk investasi

pun dana masyarakat dan menjanjikan imbal hasil yang menggiurkan. Ini adalah bentuk investasi ilegal atau biasa dikenal dengan investasi bodong.

Salah satu contohnya, penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group di Depok, Jawa Barat, dengan kedok koperasi simpan pinjam. Aktivitas perusahaan tersebut sudah dihentikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi karena berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar undang-undang (UU) perbankan.

Ada pula kasus investasi ilegal yang dilakukan PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon, Jawa Barat. OJK dan Satgas Waspada Investasi menetapkan aktivitas perusahaan tersebut sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau ilegal. PT CSI menggunakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Madani Nusantara dan KSPPS BMT Sejahtera Mandiri yang tidak memiliki izin, untuk menghimpun dana masyarakat dengan *return* atau imbal hasil sekitar 5% per bulan. Model bisnis yang digunakan perusahaan tersebut adalah investasi emas dan tabungan.

Beberapa contoh kasus tersebut memberikan gambaran bahwa iming-iming bunga atau imbal hasil tetap dan tinggi sangat mudah memengaruhi para calon investor. Mereka menjadi gelap mata karena tergodanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan tanpa memastikan keamanan produk dan keabsahan perusahaan investasinya.

Menurut Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Majalah *Infobank*, sifat serakah manusia menjadikan mereka tidak kapok terhadap jebakan investasi bodong. Hasrat ingin cepat kaya membuat mereka lupa akan prinsip dasar investasi dan mengabaikan segala risiko yang mungkin terjadi.

Hingga saat ini, menurut catatan Biro Riset Infobank (birI), masih ada sekitar 84 praktik investasi yang berpotensi menelan korban baru. Model yang ditawarkan banyak menggunakan *underlying* dari sektor riil, perkebunan, bahkan stimulus membangun rumah keagamaan.

“Yang paling sering mendapat limpahan kasus adalah OJK. Alasannya, kalau OJK menutup perusahaan tadi, maka uang nasabah tidak akan kembali. Padahal, kalau OJK tidak

menutupnya, maka akan semakin banyak memakan korban,” jelas Eko.

Meski sudah banyak memakan korban, perusahaan investasi bodong masih saja bermunculan. Izin yang dikeluarkan memang bukan dari OJK, melainkan dari lembaga-lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Karena itu, tak mudah memang memberantas pelaku investasi bodong ini. Salah satunya, menyangkut hukum. Kasus-kasus seperti ini masuk ke ranah hukum perdata dan sulit dibawa ke ranah hukum pidana.

Untuk meminimalkan jumlah korban, lembaga terkait harus mengetahui bisnis yang akan dijalankan perusahaan tersebut, sebelum izinnya diterbitkan. Jika masuk dalam skema Ponzi atau arisan berantai, izin tidak layak untuk diterbitkan dan bisnis perusahaan tersebut harus segera dihentikan agar tidak menambah jumlah korban. Selain itu, pihak berwajib harus langsung mengamankan aset pelaku untuk diambil alih karena telah melakukan praktik ilegal.

Investasi Aman

Sampai dengan saat ini, masih banyak orang yang terjebak dalam investasi bodong. Bukan karena mereka mau, melainkan karena banyak dari mereka yang kurang mendapatkan asupan informasi yang baik mengenai produk investasi.

Perlu diketahui, perbankan sebenarnya memiliki beberapa produk investasi yang bisa digunakan untuk menghindari penempatan dana investasi di perusahaan yang tak jelas. Dana yang digunakan untuk investasi di perbankan juga relatif kecil sehingga siapa pun bisa masuk ke dalamnya, seperti produk tabungan.

Untuk mereka yang berkecok agak tebal, produk seperti deposito, Obligasi Ritel Indonesia (ORI), atau tabungan rencana bisa menjadi pilihan. Dengan setoran yang terjangkau, imbal hasil yang diberikan juga ternyata lebih tinggi daripada produk tabungan biasa.

Tabungan, deposito, dan tabungan berencana memang produk perbankan yang paling laris hingga saat ini. Setoran awal yang relatif ringan dan jangka waktu yang fleksibel menjadi alasan para nasabah perbankan lebih memilih produk-produk tersebut.

Produk tersebut juga dinilai aman, dan posisi perbankan hanya sebagai agen pemasaran. Sementara, pemilik-

nya adalah perusahaan sekuritas atau bahkan perusahaan asuransi. Selain sebagai sarana investasi, produk ini bisa digunakan sebagai tabungan rencana masa depan karena imbal hasil yang ditawarkan cenderung tinggi.

Tidak hanya menguntungkan, pilihan produk investasi di perbankan juga dinilai aman lantaran dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga minim risiko. Meski begitu, setiap calon nasabah atau investor harus bisa mengenali dan memahami karakter produk investasi yang dipilihnya. ■

Tak mudah memang memberantas pelaku investasi bodong ini. Salah satunya, menyangkut hukum. Kasus-kasus seperti ini masuk ke ranah hukum perdata dan sulit dibawa ke ranah hukum pidana.

Keuntungan Besar Menjadi Penggoda

Seakan tidak belajar dari pengalaman, masih saja banyak masyarakat yang tertipu dengan investasi bodong. Imbal hasil yang menggiurkan menjadi salah satu sebab kenapa masih ada masyarakat yang terjerumus.

Ternyata masih saja ada sebagian masyarakat kita yang ingin meraup keuntungan secara instan dalam berinvestasi, tanpa “memedulikan” kredibilitas perusahaan atau lembaga tempat mereka berinvestasi. Menempatkan sebagian dana dan mendapatkan imbal hasil yang besar dengan mudah dan cepat menjadi salah satu pilihan yang paling sering dilakukan masyarakat di Indonesia.

Jalan pintas tersebut yang akhirnya membuka kesempatan bagi para lembaga atau perusahaan “tidak baik” untuk memanfaatkannya. Hal ini terjadi terutama bagi mereka yang pengetahuan mengenai produk lembaga jasa keuangannya rendah atau mereka yang aksesnya ke industri keuangan masih terbatas.

Hal itu dibenarkan Budi Raharjo, perencana keuangan dari OneShildt Financial Planning. Menurutnya, masih maraknya investasi bodong dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak paham produk investasi.

“Pelaku menawarkan investasi dan sengaja memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat,” jelasnya kepada wartawan.

Menurutnya, masih beredarnya investasi bodong juga disebabkan oleh lemahnya masyarakat dalam membedakan investasi dengan menabung. Masyarakat juga masih banyak yang belum paham risiko investasi yang mungkin saja muncul.

Budi melanjutkan, tidak hanya mudah tergiur dengan keuntungan, mereka juga mudah melupakan dan memaafkan. Hal ini yang membuat masyarakat sering jatuh di lubang yang sama. “Mereka (korban) tergiur keuntungan. Padahal, investasi juga ada risiko, misalkan risiko gagal bayar, jadi bisa kena dua hingga tiga kali,” sambungnya.

Untuk mengantisipasi jatuhnya korban lagi, menurut Budi, masyarakat harus memperhatikan lembaga atau perusahaan yang menawarkan investasi. Setidaknya, perusahaan atau



Korban investasi bodong; tidak paham produk investasi

lembaga tersebut harus sudah mendapatkan izin dari regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Senada dengan Budi, Achmad Heri Firdaus, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), membenarkan bahwa masyarakat

Indonesia cenderung ingin mendapatkan keuntungan secara instan. Rasa ingin cepat kaya menjadi alasan bagi mereka hingga gelap mata dan menempatkan dananya di investasi bodong yang banyak beredar saat ini.

“Ya, itu budaya kita yang inginnya instan. Kita inginnya *enggak capek*. Tapi, *enggak* ada dapat untungnya *gede*. Setinggi-tingginya bunga, kalau kita *nabung* di deposito ya ada batasnya, berapa persen misalnya. *Enggak* ada yang pengembaliannya 10% setahun. Jadi, masyarakatnya harus diedukasi. *Pengen* kaya cepat itu harus dihilangkan,” jelasnya.

Terkait dengan lembaga atau perusahaan yang mengelola investasi bodong, menurut Achmad, hal itu lebih disebabkan oleh pengelolaan dananya yang tidak ditempatkan di kegiatan produktif. Hal itu membuat aset yang dikelola lembaga tadi menjadi tidak jelas dan mudah sekali goyang ketika ada masalah.

Menurutnya, jika penempatan dananya ada di sektor produktif dan dikelola dengan benar, pertumbuhan aset yang akan terjadi. “Kalau masuk ke bukan kegiatan produktif, ya tidak berkembang. Kalau ada kegiatannya, dana itu bisa berputar dan tentu menghasilkan keuntungan,” kata Heri.

Dia menjelaskan, setidaknya ada dua jenis investasi bodong yang ada di Tanah Air. Pertama, perusahaan itu memang berniat mengemplang uang nasabahnya. Kedua, perusahaan itu ingin mengelola uang nasabahnya, tapi justru salah pengelolaan dan akhirnya merugi. ■

OJK Akan Berangus Investasi Ilegal

Praktik investasi bodong masih saja banyak terjadi dan tidak sedikit memakan korban. Sebagai regulator, OJK akan memberangus investasi abal-abal tersebut dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Kabar tentang terkuaknya penipuan atau investasi bodong makin sering terdengar akhir-akhir ini. Korbannya pun tidak sedikit dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai investasi disinyalir menjadi salah satu pemicu kenapa aksi tipu-tipu berkedok investasi tersebut masih juga marak. Para pelaku atau lembaga yang menawarkan investasi bodong tersebut memang sengaja memanfaatkan kelemahan masyarakat untuk terus melakukan penipuan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentu tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Berbagai macam cara terus dilakukan agar korban tidak lagi bertambah, mulai dari sosialisasi sampai dengan penutupan usaha lembaga investasi bodong.

Selain sosialisasi, OJK terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar makin melek terhadap produk investasi dan lembaga-lembaga yang mengelolanya. OJK juga meminta masyarakat untuk makin hati-hati jika ingin menempatkan uangnya dalam instrumen investasi dan harus memilih dengan saksama perusahaan investasi yang akan ditujunya.

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK, mengatakan, sebagai regulator, OJK juga terus berupaya menekan pertumbuhan lembaga investasi bodong. Pihaknya tengah memerangi lembaga atau perusahaan yang melakukan kegiatan investasi bodong tersebut.

Kendati demikian, pihaknya mengakui bahwa memerangi lembaga investasi bodong tadi tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada campur tangan pihak lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan terutama masyarakat itu sendiri.

Pihaknya juga sudah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerja sama dengan Polri,

kejaksaan, dan instansi lainnya. “Satgas Waspada Investasi itu melibatkan banyak sekali institusi, termasuk OJK, kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain. Karena, dibutuhkan peran dari semua pihak,” jelas Wimboh kepada wartawan.

Usaha untuk memberangus investasi bodong memang masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Tidak tanggung-tanggung, beberapa waktu lalu, Satgas Waspada Investasi merangkul beberapa lembaga lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan investasi tanpa izin yang kian marak di masyarakat.

Sebelumnya, satgas tersebut sudah menggandeng beberapa lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk memperkuat kerja sama dalam Satgas Waspada Investasi. Tugas satgas ini ialah mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal.

Saat ini Satgas Waspada Investasi sudah menggandeng beberapa lembaga baru untuk menguatkan upaya pencegahan dan penanganan investasi bodong. Kementerian/lembaga baru yang dimaksud ialah Bank Indonesia (BI); Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Kementerian Agama Republik Indonesia; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia; dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tambahan enam kementerian/lembaga itu akan memperkuat satgas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mengurangi jumlah kegiatan investasi tanpa izin. ■



Program perlindungan konsumen; kerja sama antarlembaga

Halalbihalal Perbanas dan IBI



menciptakan bisnis yang beretika. Setiap insan perbankan juga harus memiliki kompetensi yang baik,” jelasnya.

Menurut Maryono, bisnis perbankan tidak hanya berorientasi pada profit. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga harus dilakukan, terutama SDM yang beretika.

Maryono menambahkan, etika harus menjadi roh dalam setiap perencanaan bisnis perbankan. Potensi teknis dan kemampuan memimpin pun harus menjadi prioritas. Untuk itu, IBI menggiatkan setiap insan perbankan untuk melakukan sertifikasi.

“Kita harus tingkatkan kompetensi para bankir. Mereka harus punya kompetensi yang cukup untuk mengelola perbankan. Dalam kompetensi tadi, setiap bankir tetap harus memiliki etika agar perbankan Indonesia bisa terus maju dalam koridor yang baik,” tambahnya.

Senada dengan Maryono, Kartika Wirjoatmodjo juga mengakui bahwa para bankir di Tanah Air harus memiliki kompetensi yang baik. Pasalnya, hingga saat ini, beberapa bidang di sektor perbankan masih mengandalkan tenaga kerja dari luar negeri. Di antaranya, untuk pengembangan keamanan perbankan.

Ke depan perbankan nasional juga harus bisa ekspansi ke luar negeri. Dan, SDM yang memiliki kompetensi baik akan mendorong perbankan nasional untuk bisa “bermain” di lingkup Asia dan global. Hal itu mesti dipersiapkan sejak saat ini dan harus berkembang dalam beberapa tahun mendatang.

“Kalau dibilang *profitable*, memang agak susah. Di Malaysia sendiri, untung perbankan juga kecil. Sama halnya dengan di Filipina. Namun, saat ini sudah banyak perusahaan Indonesia yang berinvestasi di sana dan nilainya mencapai jutaan dolar,” jelas bos di Bank Mandiri ini di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.

Acara halalbihalal Perbanas-IBI juga diisi dengan *talk show* yang menghadirkan Mirza Adityaswara, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dan Mohammad Chatib Basri, ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia periode sebelumnya. *Talk show* yang dimoderatori Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Majalah *Infobank*, ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi nasional dan bagaimana cara menghadapinya pada kondisi saat ini. ■



Perbanas dan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menggelar acara halalbihalal dan “CEO Forum” pada pertengahan Juli lalu. Para petinggi bank-bank yang tergabung dalam Perbanas dan IBI serta para senior bankir hadir dalam acara tersebut untuk sekadar bersilaturahmi. Beberapa di antaranya adalah Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas dan Maryono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) IBI.

Pada kesempatan tersebut Maryono mengatakan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa setiap bankir harus memiliki kompetensi yang baik dalam mengembangkan bisnisnya. Para bankir juga dituntut memiliki etika yang baik ketika menjalankan bisnisnya.

“Bisnis perbankan banyak berubah sejak krisis beberapa tahun lalu. Untuk itu, perbankan harus

CEO Forum dan Halalbihalal Perbanas dan IBI

Masih dalam suasana Idulfitri, pada 18 Juli 2017 Perbanas dan Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menyelenggarakan “CEO Forum dan Halalbihalal” di Lobby Level, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut pengurus Perbanas, pengurus IBI, serta bankir yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif lagi di industri perbankan.

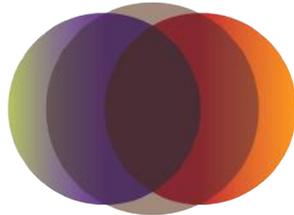
Acara yang dikemas dalam suasana silaturahmi ini juga diisi dengan *talkshow* membahas kondisi perekonomian dan perbankan nasional. Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dan Mohammad Chatib Basri, ekonom yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 2013-2014, hadir sebagai pembicara. ■



Seminar Leadership Perbanas Sumut

Pada 14 Agustus 2017 Perbanas Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan seminar *leadership* dengan tema “The Power of Negotiation and Persuasion”. Acara yang digelar di Crystal Jade, Medan, ini diikuti para profesional di sektor perbankan Sumut. Seminar tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan negosiasi dan cara memengaruhi calon nasabah supaya tertarik pada produk dan layanan perbankan yang ditawarkan. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Reuben Tjin, District 87 Director Toastmaster International dari Brunei Darussalam. ■





Indonesia Banking Expo 2017

Sumbangsih Perbankan
Untuk Ekonomi Bangsa

Jawaban industri perbankan menghadapi revolusi digital

Seminar // Pameran // Talkshow //
Bankers Performance Competition

Free Entry
Open for Public

19 - 20 September 2017
Cendrawasih Hall & Lower Lobby
Jakarta Convention Center

Sertifikasi Refreshment by
LSPP!

SEMINAR REGISTRATION:

<http://bit.ly/SeminarIBEX>

Penyelenggara



Didukung Oleh



Disponsori oleh



Bekerjasama dengan

